

KINERJA MAKRO EKONOMI INDONESIA YANG MENURUN

Ari Mulianta Ginting^{*)}



Abstrak

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), indikator kinerja makro ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2013. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi yang menurun, tingkat inflasi yang masih tinggi, dan nilai tukar rupiah yang melemah. Penurunan indikator makro ekonomi ini menunjukkan, pemerintah belum efektif bekerja dan melaksanakan fungsinya. DPR-RI harus melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran secara ketat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah.

A. Pendahuluan

Berdasarkan *Macroeconomic Dashboard* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, perekonomian nasional saat ini berada pada *critical point*. Faktor melemahnya nilai tukar rupiah, inflasi yang terus naik dan bahkan mencapai puncak tertinggi sejak *Global Financial Crisis*, disertai peningkatan defisit transaksi berjalan dan semakin tergerusnya cadangan devisa akibat *capital outflow* serta besarnya utang luar negeri swasta jangka pendek yang jatuh tempo membuat instabilitas perekonomian Indonesia meningkat. Memburuknya indikator-indikator makro ekonomi sudah berlangsung lebih dari satu tahun terakhir ini. Selain itu, tekanan yang dihadapi oleh ekonomi nasional disebabkan juga oleh semakin memburuknya ekonomi *emerging economies* serta kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Hal ini perlu diwaspadai karena bisa berlanjut

ke tahapan yang lebih buruk dan menyebabkan Indonesia masuk ke dalam lubang krisis.

B. Pertumbuhan Ekonomi yang Menurun

Dimulai dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen. Namun, di tengah kondisi perekonomian global yang belum stabil, dan kinerja perekonomian Indonesia yang terganggu akibat meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disertai dengan meningkatnya harga tarif dasar listrik, kenaikan upah buruh, dan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang lainnya menyebabkan hal tersebut menjadi sulit untuk dicapai. Untuk lebih jelasnya

^{*)} Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: ari.ginting@dpr.go.id



mengenai pertumbuhan ekonomi *overview* selama 2013 dapat dilihat pada Grafik 1 berikut.

Grafik 1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2013 terutama didukung oleh pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor transpor dan komunikasi yaitu sekitar 11,46 persen. Sementara itu sektor pertambangan pada triwulan II 2013 justru mengalami pertumbuhan yang negatif 1,19 persen, dan di sektor lain rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif walaupun pertumbuhannya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 sangat didukung oleh pertumbuhan tiga sektor utama yaitu, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor transpor dan komunikasi.

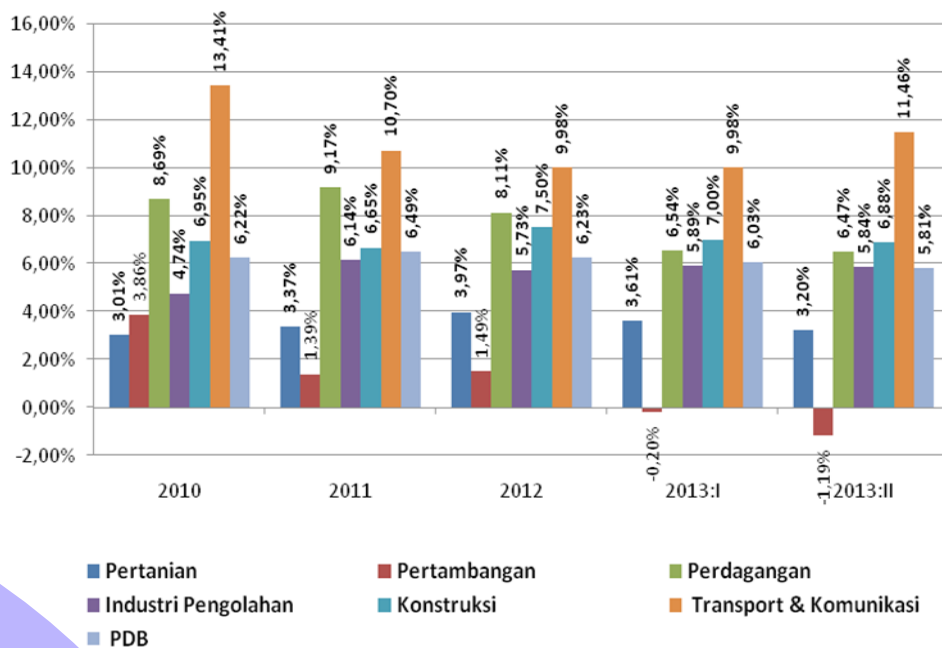
Pertumbuhan ekonomi Indonesia *year on year* berdasarkan data yang diperoleh dari BPS per triwulan III 2013 pada Tabel 1 diperoleh laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,83 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 6,2 persen. Ini menandakan bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya, baik tahun 2012, 2011 maupun 2010. Berdasarkan Tabel 1 juga konsumsi rumah tangga masih menjadi jenis pengeluaran utama

Tabel I.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (%)

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013
Konsumsi Rumah Tangga	4,6	4,7	5,28	5,29
Konsumsi Pemerintah	0,3	3,2	1,25	4,05
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,5	8,8	9,81	4,81
Ekspor Barang dan jasa	14,9	13,6	2,01	4,56
Dikurangi Impor barang dan jasa	17,3	13,3	6,65	1,38
Pertumbuhan PDB	6,1	6,5	6,23	5,83

Sumber: BPS, 2013.

Grafik I.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010–2013



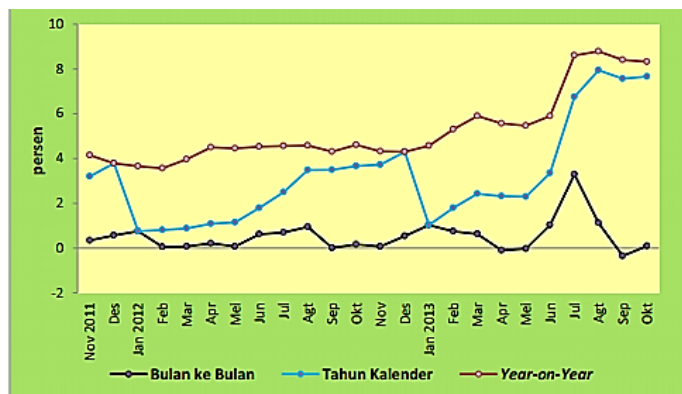
Sumber: BPS, 2013.

yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, lalu diikuti oleh jenis pengeluaran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dan ekspor barang dan jasa.

C. Tingkat Inflasi yang Meningkat

Indikator makro ekonomi selanjutnya yang ingin dicermati adalah inflasi. BPS mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang-barang dan jasa secara umum, di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Peningkatan harga BBM pada pertengahan tahun 2013 mengakibatkan tingkat inflasi meningkat drastis hingga sekarang sulit untuk kembali ke posisi inflasi pada tahun yang lalu. Berdasarkan data BPS Grafik 2 triwulan III 2013 Inflasi yang terjadi *year on year* 7,66 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi *year on year* tahun 2012 hanya sebesar 3,66 persen. Kenaikan inflasi yang begitu tinggi pada tahun 2013 disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan kenaikan indeks kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,55 persen; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,26 persen; kesehatan 0,33 persen; pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,31 persen; transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,53 persen, sedangkan penurunan harga hanya ditunjukkan oleh

Grafik 2.
Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Year on Year Tahun 2011–2013



Sumber: BPS, 2013.

penurunan indeks kelompok bahan makanan sebesar 0,66 persen dan sandang 0,56 persen.

Tingkat inflasi tahun 2013 yang cukup tinggi per triwulan III 2013 sebesar 7,66 persen diperparah dengan disparitas inflasi antardaerah yang cukup besar. Jika melihat Grafik 3, inflasi yang terjadi terutama di Kawasan Timur Indonesia mengalami tingkat yang jauh di atas rata-rata nasional. Sebagai contoh inflasi yang terjadi di kawasan timur Indonesia seperti Sorong di Provinsi Papua Barat dan Tarakan yang berada di Kalimantan Utara mengalami tingkat inflasi di atas rata-rata nasional. Sementara daerah-daerah yang berada di Indonesia Bagian Barat mengalami inflasi yang berada pada rata-rata bahkan ada beberapa daerah yang mengalami inflasi dibawah rata-rata nasional.

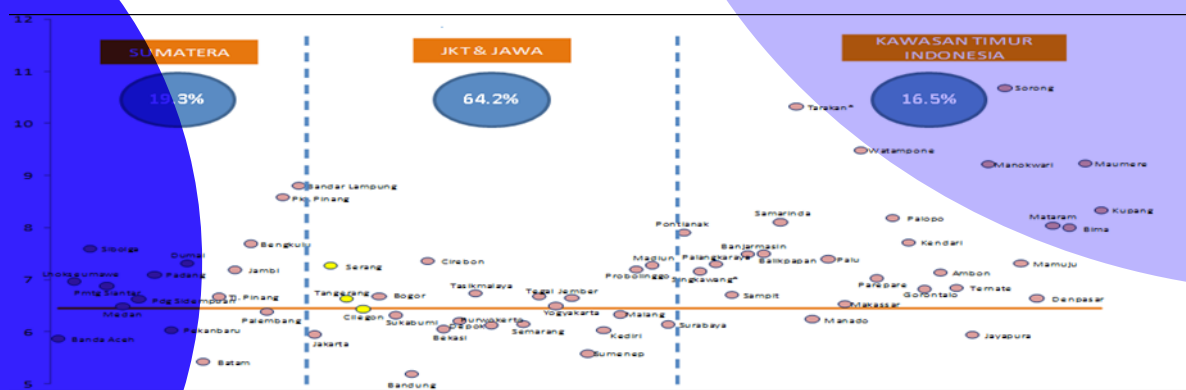
D. Nilai Tukar yang Melemah

Selama tahun 2013 rupiah mengalami fase perlemahan indeks yang cukup dalam. Penurunan

nilai tukar ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar pada awal triwulan III 2013 disebabkan oleh pernyataan Ben Bernake sebagai Gubernur Bank Central Amerika Serikat (*The Fed*) yang mengatakan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat saat ini masih membutuhkan stimulus moneter. Di satu sisi, menguatnya dolar disebabkan karena indikator ekonomi Amerika Serikat yang membaik sehingga meningkatkan kemungkinan *the Fed* akan melakukan *Quantitatif Easing Tapering*. Faktor internal yang menjadi faktor pendorong melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah inflasi yang terjadi masih sangat tinggi dan neraca perdagangan yang mengalami defisit melebar serta publikasi cadangan devisa yang terus menurun. Kombinasi faktor tersebut membuat rupiah berada pada posisi yang rendah dan melemah pada tahun 2013 jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Grafik 4 menunjukkan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang cukup signifikan dari tahun 2013 jika dibandingkan tahun 2012.

Terkait indikator-indikator makro ekonomi yang cenderung menurun, Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Eni Sri Hartati menilai, pemerintah bekerja tidak efektif dan efisien. Selain itu paket kebijakan yang berubah-ubah dan tidak ada realisasi dari pemerintah semakin mempertegas kerja pemerintah yang tidak efektif. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong perbaikan indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang positif hanya retorika semata. Selain itu, dalam pemerintahan dari tingkat bawah hingga presiden, banyak posisi elit yang memiliki *double job* sehingga tidak fokus lagi pada urusan pemerintah. Seperti ditingkat kementerian banyak yang dari partai dan mencalonkan diri dalam Pemilu 2014.

Grafik 3.
Disparitas Inflasi Indonesia di 66 Kota



Sumber: BPS, 2013.

Menurut Iman Sugema, masalah-masalah ekonomi yang mendera Indonesia sudah cukup parah. Pemerintah sebenarnya mengetahui jalan keluarnya akan tetapi sampai sekarang belum juga direalisasikan. Menurut Direktur *Institute for Global Justice* (IGJ) Salamudin Daeng, sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tapi gagal. Sebagai contoh paket kebijakan penyelamatan ekonomi yaitu perbaikan defisit transaksi berjalan dan nilai tukar terhadap dolar, menjaga pertumbuhan ekonomi, pemberian insentif untuk menjaga daya beli dan mempercepat investasi. Namun fakta yang terjadi paket kebijakan tersebut belum efektif yang terlihat dari neraca perdagangan masih berada negatif dan nilai tukar rupiah yang masih lemah terhadap dolar. Bahkan menurut Pengamat Ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha, persoalan ekonomi saat ini bukan sekadar meningkatkan investasi dari luar negeri, melainkan bagaimana masyarakat menurunkan konsumsi dalam negeri untuk kemudian dapat dan disalurkan ke sektor riil domestik. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang berpihak kepada investor dan produk dalam negeri. Apapun yang akan dikeluarkan pemerintah sekarang tidak akan bisa menyelamatkan ekonomi nasional. Saat ini pemerintah dinilai sudah tidak lagi bekerja mengurus negara. Mereka lebih fokus pada kursi jabatan untuk pemilu 2014 tahun depan.

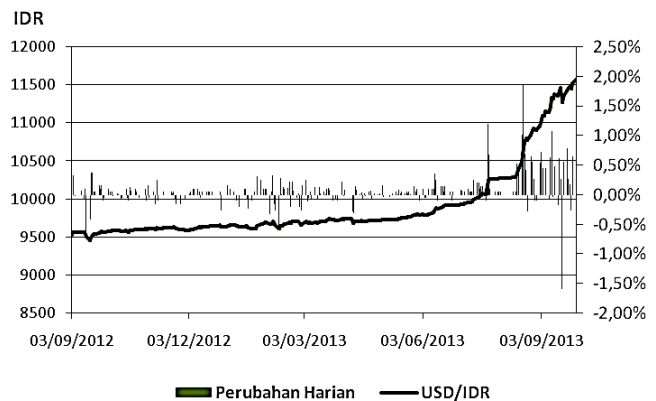
Menurut M. Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ, pembangunan ekonomi saat ini tidak berkualitas, sehingga tidak mampu menyejahterakan masyarakat. Tingginya harga barang-barang pokok, minimnya pekerjaan sehingga pengangguran meningkat bahkan hingga posisi neraca perdagangan yang terus mengalami defisit menandakan bahwa pemerintah saat ini sudah tidak mau lagi bekerja.

E. Penutup

Penurunan Indikator makro ekonomi yang terjadi saat ini dapat diartikan sebagai penurunan kinerja makro pemerintah Indonesia. Penurunan tersebut terlihat dari tiga hal yaitu pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tingkat inflasi yang meningkat cukup tajam pada tahun 2013 yang disebabkan kenaikan harga BBM, dan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar. Hal ini harus menjadi perhatian DPR-RI.

Penurunan indikator makro ekonomi mengandung arti bahwa pemerintah belum bekerja

Grafik 4.
Perkembangan
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar



Sumber: Bank Indonesia, 2013.

secara maksimal dan optimal untuk menggerakkan negara ini ke arah yang lebih baik demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan kerja keras dari pemerintah untuk dapat bekerja lebih baik, terlebih pada masa akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. DPR-RI melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya perlu mendesak pemerintah agar fokus pada tugas utamanya untuk mengelola pemerintah dan mengutamakan kemakmuran rakyat.

Rujukan:

1. "Ekonomi 2013 di Bawah Target," *Kompas*, 7 November 2013.
2. Makroekonomi Dashboard FEB UGM, "Perkembangan Ekonomi Terkini 2013, Indonesia Economic Review and Outlook," <http://macroeconomicdashboard.com/index.php/id/ekonomi-makro/136-perkembangan-ekonomi-terkini-2013-iii>, diakses 1 November 2013.
3. "Ekonomi Melambat," *Republika*, 7 November 2013.
4. BPS (2013). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 42 November*. Jakarta: BPS.
5. Artha, I Kadek Dian Sutrina (2013). *Strategi Kebijakan Moneter Tahun 2014*. Jakarta: LPEM UI
6. "Indikator Ekonomi Melorot. Kinerja Pemerintah Tak Efektif," *Neraca*, 7 November 2013.
7. "Paket Kebijakan Dianggap Gagal," <http://www.shnews.co/detile-27100-paket-kebijakan-dianggap-gagal.html>, diakses 1 November 2013.
8. "Empat Paket Kebijakan Pemerintah Tidak Efektif," <http://www.suarapembaruan.com>, diakses 1 November 2013.